LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Rahmadhani Simatupang¹, Faisar Ananda², Irwansyah³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence

Email: simatupangrahmadhani@gmail.com No. Telp:

Submitted 23 Januari 2025

Accepted 28 Januari 2025

Published 29 Januari 2025

Abstract

Marriage prohibitions from fiqh perspective include etemal prohibition (ta'bid) is a women forbidden to marry men at the longest because of nasab relationship, marriage relationship and mother's milk relationship. Temporary prohibition (gairu tabid) is women or men forbidden to marry for certain time because of amount, collection, slavery, heathen, ihram, iddah, three times divorced, and matrimony. Until now, adultery and li'an vow are still disputed. Marriage act in Indonesia is the result of normative law legislation which not arranges the prohibition of marrying slaves. The controversial section is section 40 letter c; in that section clearly established that a Moslem is prohibited to marrying a non-Moslem. In fiqh, non- Moslems involve Musyrik/Kafir who forbidden to married by Moslems and Christians/Jews (ahlul kitab) who can be married by Moslems.

Keywords: *Prohibition, perspective, regulation, marriage.*

Abstrak

Larangan perkawinan perspektif fikih mencakup larangan abadi (ta'bid), perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan, larangan sementara (gairu ta'bid) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, talak tiga dan peristrian. Yang diperselisihkan adalah zina dan sumpah li'an. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah hasil legislasi hukum normatif (fikih) dan tidak mengatur tentang larangan menikahi budak, Pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c, dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan ahlul kitab dapat di kawin.

Kata Kunci: *Larangan, perspektif, regulasi, perkawinan.*

PENDAHULUAN

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan laki-laki memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam Ilmu Alam, dikemukakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Air yang kita minum (terdiri dari oksigendan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya¹. Islam adalah agama yang fitrah, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.

Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT, yaitu terpeliharanya lima aspek al- Maqashid al-Khamsah atau al-Maqasid al-Syari'ah, yaitu memelihara (1) agama (hifz al-din), (2) jiwa (hifz al-nafs), (3) akal (hifz al-'aql), (4) keturunan (hifz al-nasab), dan (5) harta (hifz al-mâl), yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Bahkan menurut Azhar Basyar, seseorang dilarang untuk membujang. Seperti halnya pembatalan perkawinan, larangan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sususuan sampai

¹ H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),.

pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya. Maka artikel ini akan mengkaji tentang “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia”, Indonesia adalah negara yang memiliki ragam suku bangsa dan aneka budayanya. Ketika Islam datang dan menyebar di negeri ini, ajaran Islam telah mengalami penyesuaian dengan budaya lokal, sehingga membentuk karakteristik Islam tersendiri. Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, terwujudnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengalami proses sejarah panjang yang melatar belaknginya. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa proses negosiasi politik juga termasuk peran penting yang menjadi salah satu faktor terbentuknya. Permasalahan yang kemudian. Menjadi menarik untuk dikaji adalah bahwa, masih ada kesenjangan antara yang sebenarnya dan senyatanya, yaitu antara idealis-normatif dengan historis-impiris, bahwa UU Perkawinan di Indonesia telah berusia 43 Tahun, UU perkawinan dan KHI dibuat pada era Pemerintahan Orde Baru². Dengan banyaknya corak, etnis serta kultur masyarakat Indonesia yang beragam yang menjadi pertanyaan adalah bahwa relevankah peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fikih (pendapat para ulama fikih)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang perkawinan di Indonesia relevansinya dengan fikih. Sebuah penelitian literatur (library research), yang berbicara tentang aspek-aspek larangan perkawinan yang relevan dengan fikih, dan tentang aspek-aspek larangan perkawinan yang tidak relevan dengan fikih serta kaitannya dengan hukum positif.³

PEMBAHASAN

A. Aspek-Aspek Larangan Perkawinan yang Relevan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syara, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram ta’bid) dan halangan sementara (haram gairu ta’bid/ta’qit). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Mahram Ta’bid adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu

- a. Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (ta’bid) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau scibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987)

³ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8,.

garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 1. Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya. Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.” Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan UU Perkawinan dan juga KHI, ⁴kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Hal ini yang menjadi maqasid al-syariah yaitu menjaga nasab (hifz al-nasl), menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasarkan pada ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.”

- b. Persusuan (radha ‘ah), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan susuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. ¹²

Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram rada tidak boleh saling mengawini. Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan. Hubungan susuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu rada murdi’ah wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara scayah kandung maupun seibu. Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu, mengenai beberapa kali seorang ibu bayi. Menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut. Dalam hadis diatas, dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan.⁵ Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi’i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan. Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16.

⁵ Djalaluddin al-Ra’ufbin Dahlan, Aturan Pernikahan dalam Islam, (Jakarta Jal Puplicing, 2011).

8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.”Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena persusuan⁶, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, hanya saja dalam UU Perkawinan dan KHI tidak secara detail membahas tentang jumlah persusuan, hanya membahas secara umum tentang keharaman perkawinan karena nasab.

- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa’ ayat 23. Jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan musaharah adalah keharaman disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinahan.⁷

Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya. Daud berkata: “Jika anak perempuan tersebut tidak berada dibawah kekuasaannya maka ia boleh dinikahi”.Keharaman perempuan musaharah, yaitu mahram karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. Menurut Imam Hanafi, hal demikian dapat mengakibatkan keharamannya. Bahkan menurutnya, melihat kemaluan sama dengan bercampur dalam hal keharaman mengawini musaharah. Istri ayah (ibu tiri) haram dikawin, hal ini menjadi kesepakatan para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum. Namanya adalah “istri ayah” (zaujat al-abi).Ibu istri (mertua) tergolong didalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga keatas. Mereka digolongkan dalam ummahat al- nisa’i (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh)Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (jumhūr)

⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,(Bandung: Pustaka Fikriis, 2009).

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16,.

berpendapat, syarat persetujuan itu hanya berlaku bagi anak tiri, tidak berlaku bagi mertua. Jumhur ulama melihat persyaratan persetujuan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, syarat persetujuan itu berlaku pada dua maushuf (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu isteri.” Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Dalam KHI Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. B) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. C) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhûl. D) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.⁸

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam relevan dengan fikih klasik. Selain bentuk larangan perkawinan tersebut di atas, yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan musaharah, ada beberapa larangan yang Diperseleksi, yaitu:

a. Zina (Perzinaan)

Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak diharamkan, kecuali setelah masing-masing mengatakan Bertaubat. Firman Allah SWT., dalam surat al-Nûr ayat 3, apabila pezina benar-benar bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya di masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Sehubungan dengan perkawinan laki-laki dengan perempuan pezina, akan diarahkan pada masalah perkawinan perempuan hamil karena hubungan zina, baik dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan atau laki-laki lain.” Kebanyakan fuqaha’ berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan, sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang menjalani ‘iddah. Ada lagi sebagian fuqaha’ yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini.⁹

Untuk lebih jelas dapat diadakan perincian kemungkinan- kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzina sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan.
- 2) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzina dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam dua macam kemungkinan tersebut, menurut pendapat kebanyakan fuqaha’, laki-laki kawan berzina boleh mengawininya seketika, tanpa menanti ada atau tidaknya tanda-tanda kehamilan pada kemungkinan pertama, dan tanpa menanti kelahiran anak pada kemungkinan kedua; suami dibolehkan mengadakan. Persetujuan sesudah akad.
- 3) Wanita zina kawin dengan laki-laki lain, bukan kawan berzina, padahal ia dalam keadaan hamil dari zina.
- 4) Wanita zina kawin dengan lelaki bukan pezina, tetapi tidak dalam keadaan hamil,

Para Imam Madzhab sepakat bahwa, apabila seorang perempuan berbuat zina maka pernikahannya tidak batal. Namun, diriwayatkan dari Ali ra. Dan Hasan al-Basri bahwa dalam hal demikian, pernikahan itu menjadi batal. Apabila seorang pezina, maka suaminya boleh

⁸ Anshary, Muhammad, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010

⁹ Basri, Hasan, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

langsung mencampuri tanpa iddah, akan tetapi jika ia hamil maka makrûh menyetubuhinya hingga ia melahirkan, menurut Hanafi dan Syafi'i.¹⁰

Menurut Maliki dan Hanbali, diwajibkan atasnya menunggu masa iddah dan diharamkan atas suaminya menyetubuhinya hingga habis masa iddah-nya. Menurut Abu Yusuf, apabila perempuan itu hamil maka haram menikahinya hingga ia melahirkan. Sedangkan jika tidak hamil maka tidak haram menikahinya dan tidak perlu menunggu masa iddah. Sedangkan dalam hal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan, menurut Hanafi dan Hanbali, tidak halal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan. Sedangkan menurut Syafi'i, Boleh tetapi makruh. Dari Maliki diperoleh dua pendapat yaitu tidak boleh dan boleh.¹¹

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf f, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau pereturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dalam KHI Bab VIII tentang Kawin Hamil, Pasal 53 menerangkan bahwa; 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan relevan dengan fikih klasik, dengan tegas menjelaskan tentang wanita zina. UU Perkawinan tidak membahas tentang larangan nikah karena zina atau nikah dengan pezina. Sedangkan dalam KHI hanya membahas tentang nikah dengan wanita hamil (wanita hamil yang dimaksud adalah hamil karena zina), jadi dalam satu sisi KHI relevan, yaitu nikah dengan wanita zina/ wanita yang telah dizinai. Akan tetapi sisi lain tidak relevan, karena tidak membahas tentang larangan nikah dengan wanita pezina.

b. Sumpah li'an

Li'an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Jika terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

Keharaman ini didasarkan firman Allah dalam surat al-Nûr ayat 6-9. Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang dalam perkara li'an ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah; 1) Karena bilangan sumpah li'an, 2) Karena tempat paling mulia untuk berli'an. 3) Karena masa yang paling penting untuk li'an, 4) Karena sumpah itu dilakukan dihadapan jama'ah (manusia banyak).¹²

Pengaruh li'an adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru. Bila

¹⁰ Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

¹¹ Al-'Azîzy, Abd Rahmân, Kitâb Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4,

¹² Hakim, Abdul Hamid, Mabâdî al-Awaliyyah, Cet. 1, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan bukan keturunan suaminya.

Akibat hukum dari sumpah li'an yang berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut; 1) Gugur had atas istri sebagai had zina, 2) Wajib had atas istri sebagai had zina, 3) Suami istri bercerai untuk selamanya, 4) Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya, 5) Bila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya. Sebaliknya istri dapat menggugurkan had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'an-nya pula atas suaminya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagian keenam tentang Akibat Li'an, Pasal 162. Bilamana li'an terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Di dalam KHI Pasal 163 dijelaskan, bilamana li'an terjadi. Maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, yang mana telah melarang perkawinan karena sumpah li'an.

2. Haram Gairu Ta 'bid,¹³ maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.¹⁴

Dalam UU Perkawinan Bab VIII Pasal 40 tentang peristrian lebih dari empat, dijelaskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah; a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan ataupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kecukupan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan; a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja;

¹³ Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

¹⁴ In Abu Bakar Bin Muhammad, Kifayah al-Al-Husaini, Al-Imam Tagi Ahyar FiHalli Ghayah al-Ihtisar, Juz 2, Dâr El-Fikr: 1994

atau, b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau, c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.¹⁵

Pasal 42, 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan, 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43, Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang tanpa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 44, Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Hal ini sebagaimana dikutip juga dalam KHI Bab IX Tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, yaitu Pasal 55, yaitu; 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56, yaitu 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. 2) Pengajuan. Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No 9 Tahun 1975. 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; a) Istri Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. b) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁶

Pasal 58 juga menyebutkan, 1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 yaitu; a) adanya persetujuan istri, b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59, dalam hasil istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa UU Perkawinan tidak membahas secara tegas tentang pembatasan perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, yang mana peristrihan hanya dibatasi empat saja, kecuali salah satu dari empat istri tersebut ada yang dicerai karena alasan tertentu, maka halallah bagi laki-laki tersebut untuk menikah lagi.

- b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai,

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 42,.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56,.

- maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
- c. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
 - d. Demikian juga, diharamkan menyetubuhi dua perempuan kakak beradik yang dimiliki dalam perbudakan. Daud berpendapat, tidak diharamkan mengumpulkan dua bersaudara perempuan yang dimiliki dengan jalan perbudakan untuk dicampuri. Imam Hanafi berpendapat, sah menikahi seorang perempuan sesudah menikahi saudaranya. Namun, tidak dihalalkan menyetubuhinya sebelum mengharamkan persenggamaan dengan saudaranya yang telah dinikahi terlebih dahulu. Yaitu; 1) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 24, 2) Wanita yang sedang dalam iddah, baik dalam iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234.
 - e. UU No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal ini, akan tetapi dalam KHI pasal 41 ayat (1) sebagai berikut; 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; a) Saudara kandung, scayah atau seibu serta keturunannya. B) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
 - f. Dari penjelasan di atas maka dapat difahami bahwa UU Perkawinan tidak membahas tentang hal tersebut, akan tetapi KHI justru dapat melengkapi UU Perkawinan tersebut, dan relevan dengan fikih klasik, bahwa seorang laki-laki tidak dapat menikahi dua orang wanita dalam waktu bersamaan, tapi jika wanita tersebut dicerai atau meninggal maka laki-laki tersebut dapat menikahi saudara wanita tersebut.
 - g. Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar.

Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24. Dalam hal jika salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak. Baik murtad-nya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtad-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddah-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak harus cerai.¹⁷

- h. Hal ini diuraikan juga dalam KHI Pasal 75¹⁸, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri ada yang murtad. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 dijelaskan, seorang laki-laki muslim dihalalkan menikah dengan seorang wanita ahlul kitab, akan tetapi seorang wanita muslimah dilarang

¹⁷Hasan, Ahmad, Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-'Asqalani, Bandung: CV. Diponegoro, 2001

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 75.

menikah dengan seorang laki-laki ahlul kitab, karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita ahlul kitab ada harapan untuk dapat mengarahkan wanita tersebut masuk Islam, akan tetapi jika wanita muslimah dinikahi laki-laki ahlul kitab akan banyak mudharat-nya sehingga hal itu dilarang.

- i. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa pernikahan orang kafir dengan orang kafir adalah sah, pernikahannya tergantung pada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslim. Sedangkan Imam Maliki berpendapat, pernikahannya batal. Dalam Undang-undang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari larangan perkawinan dalam fikih serta relevansinya dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya. Larangan perkawinan mencakup halangan abadi (ta'bid), yaitu tidak dapat dinikahi selamanya, dikarenakan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara (gairu ta 'bid) adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu, seperti halangan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, perceraian tiga kali dan peristrian. Pada prinsipnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI merupakan legeslasi hukum Islam. Pada prinsipnya, seluruh pasal dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang menyangkut tentang larangan perkawinan, relevan dengan apa yang diutarakan dalam fikih, namun terdapat larangan perkawinan yang tidak terlegeslasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seperti larangan perkawinan dengan hamba, sedangkan pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c. KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam, sebagaimana dalam fikih, yaitu mereka yang tidak beragama Islam, dalam arti musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi dan Ahli kitab.

DAFTAR PUSTAKA

- H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987)
- Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8,.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16,.
- Djalaluddin al-Ra'ufbin Dahlan, Aturan Pernikahan dalam Islam, (Jakarta Jal Puplising, 2011),.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,(Bandung: Pustaka Fikriis, 2009).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16,.
- Anshary, Muhammad, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Basri, Hasan, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Al-'Azîzy, Abd Rahmân, Kitâb Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4,
- Hakim, Abdul Hamid, Mabâdí al-Awaliyyah, Cet. 1, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000 In Abu Bakar Bin Muhammad, Kifaya

In Abu Bakar Bin Muhammad, Kifayah al-Al-Husaini, Al-Imam Tagi Ahyar FiHalli Ghayah al-Ihtisar, Juz 2, Dâr El-Fikr: 1994

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 42,.

Hasan, Ahmad, Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bandung: CV. Diponegoro, 2001

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 75.